

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Tungki Ariwibowo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: tungki26.ari32@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of equalization funds and shopping areas against financial performance with the original area as variable income moderation at the district/city of Central Java province in the period 2010 – 2013. This study uses census study approach. The population in this research is the whole district/city of Central Java province by as much as 35 district/municipality which consists of 29 Counties and six cities. The number of samples in this study is the whole district/city of Central Java province in as many as 35 district/city. Engineering data collection using the documentation. Data analysis techniques using a classic assumption test, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, the coefficient of determination and the absolute difference test. The results showed that Equalization Fund and shopping areas and significant negative effect on performance of regional financial (ratio of independence) on the district/city of Central Java province in the period 2010 – 2013. The original regional income positive and significant effect on performance of regional financial (ratio of independence) on the district/city of Central Java province in the period 2010 – 2013. The original area of influence to moderate income fund balances and expenditures against regional financial performance at the district/city of Central Java province in the period 2010 – 2013, proved to be the truth.

Keywords: *Equalization Funds, shopping districts, and the ratio of the area of the original Income Independence*

PENDAHULUAN

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah

daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Menurunnya pendapatan daerah maka akan mempengaruhi belanja daerah, karena pemerintah akan menyesuaikan alokasi belanja dengan pemasukan yang diperoleh. Perubahan alokasi belanja ini akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel moderasi yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suhandarini Sugiyono (2012) dan IGA Gede Wertianti dan A.A.N.B. Dwirandra (2013). Hasil penelitian Suhandarini Sugiyono (2012) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah secara signifikan memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan anggaran belanja modal. Dengan meningkatnya belanja modal maka akan meningkatkan daerah tersebut untuk dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam hal pembiayaan maupun pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh IGA Gede Wertianti dan A.A.N.B. Dwirandra (2013) yang menyatakan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Alasan Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai variabel moderasi karena pendapatan asli daerah mempunyai peran didalam menentukan kinerja keuangan daerah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Kabupaten/Kota yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi akan memperoleh dana perimbangan yang rendah dari pemerintah pusat, khususnya dari

pos DAU dan DAK sehingga kemampuan kemandirian daerah menjadi tinggi. Sedangkan belanja daerah berasal dari dana yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah. Semakin tinggi dana dari pendapatan asli daerah, maka belanja daerah juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian maka ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

Besar kecilnya pendapatan asli daerah juga akan menentukan apakah daerah tersebut dapat dikatakan mandiri ataukah tidak. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah tersebut dapat sepenuhnya membiayai pengeluaran daerah dengan sumber pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa menggantungkan dana dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Konsekuensi dari otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar bermanfaat untuk pengambilan keputusan yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP Nomor 24 Tahun 2005: 32). Menurut Halim (2004), salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu, pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) yang memiliki arti memberikan informasi

keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2006: 34).

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Indikator dari keberhasilan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang baik adalah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Interen (www.bpk.go.id).

Pada kenyataannya banyak daerah yang belum mampu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan (Heny Susantih dan Saftiana, 2010: 4).

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 148). Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ebit Julitawati (2012) yang meneliti tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel belanja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah. Alasan penambahan variabel belanja daerah karena belanja daerah menggambarkan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes dan belanja tidak terduga. Melalui belanja daerah tersebut dapat diketahui alokasi masing-masing daerah terhadap penggunaan anggaran pada pos belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Alasan pemilihan objek penelitian pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah karena PAD pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah terjadi ketimpangan, sehingga mengakibatkan pembangunan daerah tidak merata. Sebagai contoh PAD pada tahun

2013 pada Kabupaten Blora sebesar Rp 95.186.717,00 sedangkan PAD Kota Semarang tahun 2013 sebesar Rp 925.919.311,00 (Jawa Tengah Dalam Angka 2014).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Untuk menganalisis apakah pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus karena semua populasi dijadikan sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan: dokumentasi.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dalam penelitian ini dihitung dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2010 - 2013.
3. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2010 - 2013 (dalam satuan Ribu Rupiah).
4. Kinerja keuangan daerah
Kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variances Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
 - b. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
 - c. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

- d. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 16.
2. Pengujian Hipotesis
 Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji selisih mutlak.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Hasil Uji Asumsi Klasik

| Uji Asumsi Klasik | Hasil Uji | Kesimpulan |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Uji Multikolinearitas | Tolerance (0,190); (0,135); (0,488) > 0,1 VIF (5,274); (7,427); (2,047) < 10 | Tidak ada multikolinearitas |
| Uji Autokorelasi | P (0,396) > 0,05 | Tidak ada Autokorelasi |
| Uji heteroskedastisitas | P (0,695); (0,452); (0,118) > 0,05 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Uji Normalitas | P (0,094) > 0,05 | Residual normal |

Sumber: Pengolahan data sekunder 2015

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu dana perimbangan (X_1), belanja daerah (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y).

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | Koefisien | t | Sig. |
|------------------------|-----------|--------|------|
| (Constant) | 12.306 | 25.921 | .000 |
| Dana perimbangan | -4.5E-006 | -2.479 | .015 |
| Belanja daerah | -4.8E-009 | -3.649 | .000 |
| Pendapatan asli daerah | 5.59E-008 | 26.966 | .000 |

Adjusted R Square = 0,914
 F-hitung = 457,278
 Sig. F = 0,000

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = 12,306 - 4.5E-006X_1 - 4.8E-009X_2 + 5.59E-008X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : 12,306 artinya jika dana perimbangan (X_1), belanja daerah (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) sama dengan nol, maka kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) adalah positif sebesar 12,306 persen.
- b_1 : -4.5E-006 artinya pengaruh variabel dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode

2010 - 2013 negatif, artinya apabila dana perimbangan meningkat, maka dapat menurunkan kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013, dengan asumsi variabel belanja daerah (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) dianggap tetap.

b_2 : -4.8E-009 artinya pengaruh variabel belanja daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 negatif, artinya apabila belanja daerah meningkat, maka dapat menurunkan kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013, dengan asumsi variabel dana perimbangan (X_1) dan pendapatan asli daerah (X_3) dianggap tetap.

b_3 : 5.59E-008 artinya pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X_3) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 positif, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013, dengan asumsi variabel dana perimbangan (X_1) dan belanja daerah (X_2) dianggap tetap.

Dari analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 adalah variabel pendapatan asli daerah (X_3), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 5.59E-008 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (dana perimbangan (X_1) sebesar -4.5E-006, belanja daerah (X_2) sebesar -4.8E-009).

Adapun hasil analisis uji t adalah:

- a. Pengujian signifikansi pengaruh dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 diperoleh *probability value* sebesar $0,015 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013”, terbukti kebenarannya.
- b. Pengujian signifikansi pengaruh belanja daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013”, terbukti kebenarannya.
- c. Pengujian signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah (X_3) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah (X_3) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013. Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013”, terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu dana perimbangan (X_1), belanja daerah (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013.

4. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,914 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu dana perimbangan (X_1), belanja daerah (X_2) dan pendapatan asli daerah (X_3) terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013 sebesar 91,4 persen sedangkan sisanya ($100\% - 91,4\%$) = 8,6 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

5. Uji Selisih Mutlak 1

Berdasarkan analisis regresi linear berganda pengaruh dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) dengan dimoderasi oleh pendapatan asli daerah (X_3) diperoleh hasil seperti tabel berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Nilai Selisih Mutlak 1

| Variabel | Koefisien | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------|---------|-------|
| (Constant) | 9.977 | 45.492 | 0,000 |
| Zscore: dana perimbangan | -2.283 | -15.468 | 0,000 |
| Zscore: Pendapatan asli daerah | 4.927 | 24.759 | 0,000 |
| ABSX1_X3 | .766 | 3.096 | 0,002 |

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh *p-value* sebesar $0,002 < 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_3) memoderasi pengaruh variabel dana perimbangan (X_1) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y), karena koefisien regresi nilai absolut $|ZX_1 - ZX_3|$ positif (0,766), maka variabel pendapatan asli daerah memperkuat pengaruh variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y). Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi: "Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013" terbukti kebenarannya.

6. Uji Selisih Mutlak 2

Berdasarkan analisis regresi linear berganda pengaruh belanja daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y) dengan dimoderasi oleh pendapatan asli daerah (X_3) diperoleh hasil seperti tabel berikut:

Tabel 4: Hasil Uji Uji Selisih Mutlak 2

| Variabel | Koefisien | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------|---------|-------|
| (Constant) | 10.006 | 46.231 | 0,000 |
| Zscore: dana perimbangan | -2.798 | -15.540 | 0,000 |
| Zscore: Pendapatan asli daerah | 5.909 | 27.633 | 0,000 |
| ABSX1_X3 | .906 | 2.954 | 0,004 |

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh dengan p -value sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_3) memoderasi pengaruh variabel belanja daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) (Y). Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi: "Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2013" terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Ada pengaruh yang negatif dan signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 2) Ada pengaruh yang negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013. 4) Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya. 5) Pendapatan asli daerah memoderasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010 - 2013, terbukti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arja Sadjiarto, 2000, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.1 Tahun 2000, Hal. 138-150.
- Asha Florida, 2007, Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, (tidak dipublikasikan).
- Cherrya Dhia Wenny, 2012, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol, 2 No, 1 September 2012, Hal, 39-51.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2006, *Statistik Induktif*, Yogyakarta: BPFE.
- Dora Detisa, 2010, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Ebit Julitawati, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi*, Volume 1, No, 1, Agustus 2012, Hal, 15- 29.
- Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta: UI- Press.
- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Erstelita Tria Ramadhani Darwis, 2015, Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat), *Artikel Ilmiah*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
- Harun Hamrolie, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Heny Susantih dan Saftiana, 2010, Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Sriwijaya, (tidak dipublikasikan).

- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2007, *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- [http://jateng.bps.go.id/jawa tengah dalam angka 2014](http://jateng.bps.go.id/jawa_tengah_dalam_angka_2014), Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, Jam 22.15 WIB.
- [http://jateng.bps.go.id/jawa tengah dalam angka 2013](http://jateng.bps.go.id/jawa_tengah_dalam_angka_2013), Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, Jam 22.35 WIB.
- [http://jateng.bps.go.id/jawa tengah dalam angka 2012](http://jateng.bps.go.id/jawa_tengah_dalam_angka_2012), Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, Jam 22.48 WIB.
- [http://jateng.bps.go.id/jawa tengah dalam angka 2011](http://jateng.bps.go.id/jawa_tengah_dalam_angka_2011), Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, Jam 23.05 WIB.
- IGA Gede Wertianti dan A.A.N.B. Dwirandra, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi, *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana Volume 4.3 Tahun 2013, Hal. 567-584.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Machfud Sidik, 2002, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, *Makalah*, Disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi I, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- _____, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nordiwawan, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010, Analisis Kinerja Keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 1, Juni 2010.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhandarini Sugiyono, 2012, Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol 2, No 3 Mei 2014.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Padang: Andalas Lima Sisi.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserarch*, Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Widjaja, 2002, *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- www.djpk.depkeu.go.id, dana perimbangan kabupaten kota, Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, Jam 21.10 WIB.